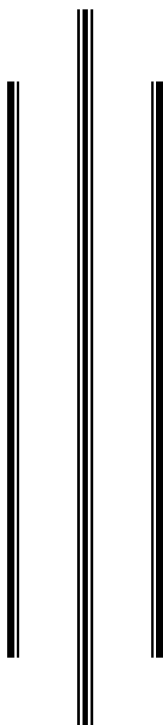




**RANCANGAN RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2025**





KEPUTUSAN ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT

Nomor : Kep/ /I/REN.2.3./2024

Tentang

RANCANGAN RENCANA KERJA ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH SUMATERA BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menetapkan Keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
7. Buku Rancangan Grand Strategy Polri 2025-2024.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kapolda Sumbar Nomor: Kep/ /I/2024 tanggal Januari 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat TA. 2024;

2 KEPUTUSAN IRWASDA POLDA SUMBAR
NOMOR : KEP/ /I/REN.2.3./2024
TANGGAL: JANUARI 2024

2. Pagu Ideal Itwasda Polda Sumbar T.A. 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN IRWASDA POLDA SUMATERA BARAT TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

1. Rancangan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan penyusunan kegiatan Tahun Anggaran 2025;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padang
pada tanggal:

Januari 2024

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



Arif Rahman Hakim
ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050542

DAFTAR ISI

	Halaman
I. LATAR BERLAKANG	
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan	3
b. Analisis	33
2. Identifikasi Masalah	34
II. TUJUAN DAN SASARAN	
3. Visi dan Misi	34
a. Visi Polda Sumbar dan Visi Itwasda Polda Sumbar	34
b. Misi Polda Sumbar dan Misi Itwasda Polda Sumbar	35
4. Tujuan	36
a. Tujuan Polda Sumbar Tahun 2024	36
b. Tujuan Itwasda Polda Sumbar Tahun 2024	36
5. Sasaran Prioritas Tahun 2024	37
a. Sasaran Prioritas Polda Sumbar	37
b. Sasaran Prioritas Itwasda Polda Sumbar	38
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
6. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sumbar Tahun 2024	37
7. Arah Kebijakan dan Strategi Itwasda Polda Sumbar Tahun 2023 ..	45
IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	
8. Program kegiatan	47
9. Pagu Ideal	48
V PENUTUP	
10. Penutup	47
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. RKT	
2. RKA-KL	

**RANCANGAN RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari tahapan Rencana Strategis Itwasda Polda Sumbar 2025-2029 dan sebagai kelanjutan dari pertahapan Rencana strategis TA. 2020-2024. Rancangan Rencana Kerja T.A. 2025 disusun dengan memperhatikan Rancangan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat T.A. 2025.

Pelaksanaan tugas Itwasda Polda Sumbar telah berjalan cukup baik, ditandai dengan terwujudnya pelaksanaan pengawasan di lingkungan Polda Sumbar untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal. Adapun tugas-tugas yang telah dapat mewujudkan keberhasilan pada Itwasda Polda Sumbar adalah kegiatan Audit Kinerja, Reviu, Pemantauan Tindak Lanjut (PTL), Evaluasi, Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pendampingan Giat Pengawasan, Pemberian Konsultasi, dan Asistensi.

Keberhasilan yang diraih diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan tugas dimasa yang akan datang.

Lingkungan strategis baik global, nasional dan regional sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan hambatan yang dihadapi, dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Polda Sumatera Barat. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, seolah-olah telah menjadi tanpa batas seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Hal ini akan mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai dan budaya bangsa yang positif berubah menjadi perilaku-perilaku negatif seperti: materialistis, konsumtif dan hedonisme dan radikalisme.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, kejahatan siber, penyelundupan manusia, narkotika, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang.

Selanjutnya perkembangan lingkungan strategis nasional harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa berubah di setiap daerah. Semua isu strategis baik global, nasional dan regional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Itwasda Polda Sumbar T.A. 2025.

Untuk pencapaian keberhasilan kinerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun 2025, perlu adanya dukungan dari Satker/Satwil Polda Sumbar dan kepercayaan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai yang dikenal sebagai filosofi "***Tungku Tigo Sajaringan, Tali Tigo Sapilin***", artinya di Sumatera Barat harus dibangun hubungan kerjasama dan bersinergit dengan seluruh *stake holder yang ada*, agar terwujud keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Untuk mewujudkan kondisi tersebut di atas maka dijabarkan dalam program dan kegiatan serta anggaran

yang mengacu kepada sasaran prioritas, arah kebijakan dan strategi Itwasda Polda Sumbar Tahun 2025.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal diwilayah Hukum Polda Sumatera Barat yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang akan digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1). Geografi

- a) Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' Lintang Utara sampai 3°30' Lintang Selatan serta 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur dengan luas total wilayah sekitar 42.012,89 Km² atau luas tersebut setara dengan 2,17 % dari luas Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Barat terletak disebelah Barat pulau Sumatera.
- b) Sumatera Barat merupakan daerah rentan terjadinya gempa bumi baik didarat maupun dilaut disebabkan karena wilayah sumbar terletak diatas lempeng eurasia dan lempeng Indo australia yang mempunyai beberapa retakan antara lain: retakan/patahan disepajang pulau sumatera (patahan semangka) mulai dari wilayah Aceh sampai ke Lampung dan retakan/patahan Mentawai Antara pulau Sumatera dengan Pulau Mentawai serta patahan sebelah barat pulau Mentawai bagian barat Kep. Mentawai (antara batas lempeng eurasia dgn lempeng australia /zona subduksi sumatera) dimana lempeng australia bergerak mendorong lempeng eurasia dengan kecepatan ± 7 cm / tahun ke arah timur laut serta adanya 2 (dua) gunung yang masih aktif yaitu Gunung Merapi di daerah Bukittinggi/Tanah Datar dan dan Gunung Talang di wilayah Kabupaten Solok, sehingga Sumbar merupakan daerah rawan bencana Gempa bumi berupa gunung meletus maupun gempa bumi tektonik yang berpotensi timbulnya tsunami.
- c) Sumatera Barat Wilayah Sumatera Barat merupakan jalur perlintasan yang menghubungkan antar Provinsi di pulau Sumatera melalui jalur darat dan berbatasan secara langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Propinsi Bengkulu yang mobilitasnya sangat padat dan rentan terjadinya konflik perbatasan, konflik sosial, konflik agraria perkebunan, tambang, penyelundupan dan kriminalitas lainnya.

- d) Wilayah Sumatera Barat yang memiliki luas lebih kurang 42.297,30 km berupa daratan dan lautan terdiri dari 391 Pulau pulau kecil dan besar yang berhadapan dengan samudera Hindia yang merupakan perlintasan jalur ekonomi internasional yang rentan terjadinya gangguan kamtibmas (penyelundupan, terorisme, pencurian ikan, illegal logging, narkoba dan kejahatan transnasional lainnya).
- e) Sumatera Barat mempunyai 19 Kabupaten/Kota dengan Kabupaten Mentawai memiliki wilayah terluas yaitu 6,01 ribu Km² atau sekitar 14,21% luas Propinsi Sumatera Barat, sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas daerah terkecil yaitu 23,0 Km² atau 0,05% dari luas propinsi Sumbar.
- f) Alam Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhannya, sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sebesar 23.19,11 Km² atau sekitar 54,83% dari kawasan seluruhnya.
- g) Sumatera Barat juga memiliki empat danau yang indah yaitu danau singkarak, danau diatas dan danau dibawah terletak di Kabupaten Solok, danau maninjau terletak di Kabupaten Agam serta terdapat gugusan gunung yang hampir diseluruh Kabupaten /Kota gunung yang paling tinggi adalah gunung Talamau di kabupaten Pasaman Barat dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut serta adanya gunung yang aktif masing-masing Gunung Merapi di wilayah Kab/Kota Padang Panjang/Tanah Datar, Gunung Talang terletak di Kabupaten Solok.
- h) Alam Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhannya, sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sebesar 23.19,11 Km² atau sekitar 54,83% dari kawasan seluruhnya.

2). Demografi

- a) Jumlah penduduk Sumbar berdasarkan tahun 2023 sebanyak 5.640.629 jiwa terdiri laki-laki sebanyak 2.841.802 jiwa dan perempuan sebanyak 2.798.827 jiwa. Menurut Kabupaten dan Kota jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Padang 919.145 jiwa sedangkan Kota Padang Panjang merupakan daerah yang paling sedikit penduduknya 57.850 jiwa, Kota yang terpadat penduduknya adalah Bukittinggi yaitu mencapai 5.102 jiwa /km², sedangkan kabupaten yang terjarang penduduknya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, hanya 15 jiwa/ km².
- b) Tingkat kepadatan penduduk Sumatera Barat tahun 2022 rata-rata 132/ km², kepadatan penduduk tertinggi di Kota Bukittinggi hampir

4.941/Km² dan penduduk terjarang adalah Kab. Kepulauan Mentawai yaitu 14,46 orang per Km². Penduduk Sumbar Mayoritas terdiri dari suku Minangkabau, sedangkan dalam jumlah kecil terdiri suku Jawa, Batak, Aceh, Melayu, Nias, Cina.

- c) Penduduk Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas beragama Islam, sehingga berpengaruh terhadap pola pikir dan landasan moral serta sepiritual masyarakat. Namun keberadaan agama lainnya tetap memperoleh tempat untuk berkembang. Sikap solidaritas dan kerukunan hidup antar umat beragama masih tetap terpelihara, hal ini menjadi salah satu potensi yang menguntungkan bagi pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
- d) Pertambahan penduduk di Sumatera Barat setiap tahun sekitar 1 s/d 2 % dengan penyebarannya yang tidak merata serta terjadinya peningkatan angkatan kerja sedangkan lapangan kerja sangat terbatas/tidak seimbang sehingga terjadinya kepadatan penduduk di beberapa wilayah di Sumbar, makin tingginya pengangguran dan kemiskinan sehingga rentan terjadinya gangguan kamtibmas.
- e) Propinsi Sumatera Barat juga merupakan wilayah yang didiami oleh penduduk yang heterogen dari berbagai macam agama dengan prosentase pemeluk agama tahun 2023:
 - (1) Agama Islam sebanyak 97,6 %
 - (2) Agama Protestan sebanyak 1,5 %
 - (3) Agama Khatolik sebanyak 0,84 %
 - (4) Agama Hindu sebanyak 0,0056 %
 - (5) Agama Budha sebanyak 0,84 %
 - (6) Agama lainnya sekitar 0,0158 %

3) Sumber Daya Alam

- a) Sumber Daya Alam di Propinsi Sumatera Barat sebagai penghasil Devisa Negara relatif kecil dibandingkan dengan propinsi lain disektor pertanian adalah Cacao, Cengkeh, kelapa sawit, gambir, kulit manis, disektor industri adalah semen padang, kondisi tersebut disamping jumlahnya relatif kecil dan belum tereksplorasi sepenuhnya dikarenakan belum adanya Sumber Daya Manusia yang mumpuni, disamping adanya indikasi investor asing takut masuk ke Sumbar dikarenakan adanya polemik dan masalah pembebasan tanah yang cukup rumit dan sulit, sehingga memberatkan para investor itu sendiri bila akan menanamkan sahamnya ke Wilayah Sumbar.
- b) Sumber daya alam lainnya yang potensial dikembangkan di wilayah Sumatera Barat adalah kelautan, Perikanan, keindahan alam

pesisir pantai dan laut seperti di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat sedangkan Kepulauan Mentawai berupa keindahan Pantai dan Keindahan alam bawah laut, untuk kegiatan menyelam dan berenang, surfing/peselancar serta pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk wisata.

- c) Masyarakat Sumatera Barat memiliki budaya yang khas serta memiliki keindahan alam yang mengagumkan sehingga dikenal sebagai daerah tujuan wisata baik lokal, nasional maupun mancanegara. Kota Bukittinggi merupakan suatu daerah yang beriklim sejuk dikelilingi oleh gunung-gunung dengan nagari-nagari tradisional serta tatanan kehidupan yang masih bertahan selama berabad-abad, Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi dengan mempunyai ciri khas masakan Padang yang terkenal sampai ke Mancanegara, sehingga setiap orang yang pernah berkunjung ke sumbar selalu terkesan dan tidak mudah melupakan keindahannya.
- d) Sebagai dampak lingkungan terhadap pengelolaan Sumber daya alam yang tidak dikelola secara profesional dan provosional menyebabkan terjadinya bebarapa pelanggaran hukum seperti illegal meaning, illegal logging, illegal phising/pencurian ikan dapat berdampak negatif, disamping rusaknya ekosistem yang ada disekitar lokasi, terjadinya hutan gundul yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam banjir/tanah longsor yang merugikan masyarakat setempat maupun kerugian negara.
- e) Kekayaan alam khususnya kelautan memiliki potensi ikan sebagai penghasil Devisa negara namun dengan terbatasnya sumber daya manusia yang kurang handal sehingga potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
- f) Luas hutan di wilayah Sumatera Barat menunjukkan semakin terjadinya penurunan setiap tahunnya akibat adanya alih fungsi baik secara resmi yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait dengan adanya pemekaran wilayah dengan perubahan RT/RW atau dengan secara illegal yang dilakukan masyarakat setempat untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan dari data tahun 2019 hutan yang ada di wilayah Propinsi Sumatera Barat sebagai berikut:
 - (1) Hutan lindung seluas : 923.246 Ha.
 - (2) Hutan Suaka alam dan wisata : 773.434 Ha.
 - (3) Hutan Produksi terbatas : 216.233 Ha
 - (4) Hutan Produktif tetap seluas : 429.281 Ha

4) Ideologi

- a) Berkembangnya berbagai aliran kepercayaan di beberapa wilayah Indonesia termasuk aliran radikal yang baru-baru ini muncul yaitu ISIS (Islamic State of Irak and Syria) yang menginginkan perubahan ideologi Pancasila menjadi syariah yang berkedok Islam, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai azas negara di Indonesia, Kelompok Islam radikal ini akan terus berupaya menyebarkan pengaruhnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk Sumatera Barat.
- b) Pengaruh situasi global dari negara barat saat ini, dimana masyarakat merasa mendapat suatu kebebasan dalam berdemokrasi khususnya dalam membentuk suatu organisasi termasuk organisasi yang akan menghidupkan kembali paham ideologi komunis, di Sumbar sejak tahun 2012 (di Kota Padang, Bukittinggi, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok dan Padang Panjang) telah menemukan organisasi /kelompok / aktivis yang tergabung dalam YPKP (Yayasan Penelitian Korban Peristiwa) 1965 / 1966 dan pada tahun 2015 pada saat DPP YPKP Sdr. Bejo Untung akan melakukan pelantikan salah satu ketua DPC YPKP Kota Bukittinggi di Bukittinggi mendapat protes keras dari masyarakat Kota Bukittinggi sehingga rencana pelantikan PDC YPKP Bukittinggi batal dilaksanakan karena di protes oleh masyarakat sekitar.

5) Politik

- a) Kondisi Politik secara Nasional masih dihadapkan pada upaya untuk melanjutkan reformasi disegenap aspek kehidupan nasional dengan bertumpu pada prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara. Hasil pembangunan politik dirasakan masih kurang antara lain tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga politik semakin merosot karena makin banyak elite politik yang terjerat kasus korupsi dan tidak ada keteladanan serta eforia yang kebablasan yang mengakibatkan norma-norma hukum dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat dilerlanggar.
- b) Munculnya kelompok-kelompok baru yang tidak puas dengan sistem politik dan kehidupan partai politik sekarang ini mereka berobsesi mencitakan sistem politik baru dengan menolak format politik yang berlaku sekarang, kelompok ini biasanya berada di level akar rumput mengagregasi kepentingan rakyat yang paling riil yang mudah diartikulasikan menjadi isu politik dengan arah gerakannya adalah sebagai berikut :

1) Mendelegitimasi.....

- (1) Mendelegitimasi partai dan sistem politik sekarang melalui issukorupsi.
 - (2) Memobilisasi massa dan melakukan tekanan ekstra parlementer.
 - (3) Memasuki gelanggang politik dengan mengkampanyekan calon independen ataupun partai politik lokal.
- c) Sistem Politik dalam negeri menganut sistem demokrasi sesuai nilai nilai Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat namun realitanya demokrasi liberal lebih menonjol dalam sistem proses pengambilan keputusan yakni melalui mekanisme voting yang berlaku dari pusat sampai ke tingkat daerah.
- d) Struktur Politik saat ini masih menghadapi berbagai tuntutan masyarakatantara lain:
- (1) Masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara maupun pejabat tingkat daerah sehingga terkesan bahwa para pejabat belum bisa dijadikan panutan/ccontoh teladan bagi masyarakat luas.
 - (2) Pelayanan publik yang dianggap masyarakat belum baik sebagai akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada kepentingan pribadi dan kelompok, tanggung jawab pekerjaan pada instansi /lembaga masih tumpang tindih serta birokrat belum mendapat imbalan penghasilan yang memadai sesuai yang diharapkan sehingga sering terjadi pelanggaran hukum / korupsi hampir di semua instansi pemerintah baik ditingkat pusat sampai ke tingkat daerah.
 - (3) Perkembangan netralitas birokrasi masih semu sebagai akibat adanya aturan bahwa partai politik berhak menetapkan calon pimpinan pemerintah pusat maupun pimpinan daerah disamping Sistem Multi partai saat ini belum sepenuhnya mampu menghasilkan pemerintah yang kuat karena di negara Indonesia tidak menganut sistem oposisi yang mengontrol dan mengkritisi kebijaksanaan pemerintah.
 - (4) Proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan nasional masih didominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol melalui wakil rakyat dan elite politik yang berada di kursi pemerintah, musyawarah untuk mufakat yang merupakan amanat pembukaan UUD 1945 tidak terimplementasi secara konsisten ini terlihat dari dominasi peran fraksi dari pada peran wakil rakyat pengambilan keputusan lebih cenderung menggunakan model Voting.

e) Budaya.....

- e) Budaya politik dalam berdemokrasi kondisinya belum menunjukkan iklim dan budaya politik yang benar, budaya politik masih bersifat parokial, primordial, oportunistis, nepotis feodal dan anarkis indikatornya antara lain masih adanya pengerahan kekuatan massa politik sebagai kelompok penekan yang bernuansa kekerasan dan destruktif.
- f) Budaya paternalistik masih kuat pengaruhnya pada konteks pemilihan kepemimpinan etika politik belum sepenuhnya mempedomani prinsip-prinsip demokrasi hal ini terlihat banyaknya pemaksaan kehendak dan adanya kelompok yang tidak siap kalah dalam pertarungan politik. Figur kharismatik masih menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan partai.
- g) Kebebasan Pers sangat dinamis dan belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak tanggung jawab serta cenderung mengabaikan etika terhadap berbagai pemberitaan, Media massa masih mengutamakan kepentingan keuntungan bisnis dibandingkan dengan resiko sosial politik.
- h) Sistem hukum nasional belum berjalan maksimal yang meliputi substansi hukum, kelembagaan, sarana dan prasarana dan budaya hukum sebagai akibat dari pembangunan hukum yang belum selesai secara tuntas, Perumusan perundang-undang belum sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan masyarakat umum disebabkan sebagian penyusun undang-undang lebih mengedepankan kepentingan politik sesaat dari pada kepentingan nasional.
- i) Penegakan hukum masih dihadapkan belum optimalnya kinerja aparat penegak hukum, selain itu masih terjadi mafia peradilan dan diskriminasi dalam penerapan hukum faktor lain yang dapat menghambat penegakan hukum disebabkan integritas, moralitas dan profesionalisme penegak hukum hingga saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- j) Jumlah Nagari di wilayah Sumbar tahun 2023 sebanyak 1.228 nagari yang merupakan Pemerintah terendah dibawah Kecamatan ternyata belum mempunyai batas wilayah secara hukum akan tetapi batas ditentukan menurut hukum adat setempat sehingga hal ini merupakan kerawanan dimasa yang akan datang yakni terjadinya permasalahan konflik sosial berupa kasus keagrariaan/pertanahan, batas wilayah, pertambangan dan masalah perkebunan.

k) Partisipasi.....

- k) Partisipasi masyarakat untuk memilih calon Legislatif mulai dari DPRD Kab/Kota, Provinsi dan DPR RI serta DPD RI sangat tinggi, karena pelaksanaannya di lakukan serentak dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, dari pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 yang mencapai 71 %, sementara pada pelaksanaan Pilpres tahun 2019 di Sumbar mencapai 79,6 %. Namun pada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur terjadi penurunan partisipasi masyarakat yaitu dengan menjadi hanya 65,42 %.
- l) Suhu Politik secara Nasional pasca dilaksanakan pesta Demokrasi Pileg dan Pilpres 2019 relatif aman dan kondusif serta situasi Politik pasca pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Sumbar pada umumnya dalam keadaan relatif aman walaupun terjadi gejolak politik secara nasional namun di Sumbar masih tetap bisa terkendali serta menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 situasi saat ini telah membawa beberapa perubahan besar dari dinamika politik yang ada, diantaranya munculnya partai - partai baru untuk menjadi peserta konstetasi politik di tahun 2024, munculnya serta pergerakan dari beberapa Tokoh Nasional / Pejabat yang di gadang-gadang menjadipasangan presiden 2024.
- m) Isu-isu kebijakan pemerintah yang kontroversi serta problematika lama yang belum tuntas di masyarakat yaitu transparansi RUU KHUP, RUU Omnibuslaw, Pembangunan IKN.
- n) Suhu Politik wilayah Propinsi Sumatera Barat tahun 2024 diperkirakan akan menegang menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, dikarenakan dengan telah dimulainya rangkaian tahapan pileg, Pilpres, dan pemilihan kepala Daerah tahun 2024.
- o) Jadwal Pemilu Serentak tahun 2024 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD RI akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sedangkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.

p) Telah.....

- p) Telah berlangsung beberapa rangkaian tahapan Pemilu serentak tahun 2024 yaitu saat ini sedang berlangsung tahap Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta penetapan nomor urut Partai Politik peserta Pemilu 2024 diantaranya :
- (1) Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 - (2) Nomor Urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
 - (3) Nomor Urut 3 PDI Perjuangan
 - (4) Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya (Golkar)
 - (5) Nomor Urut 5 Partai NasDem
 - (6) Nomor Urut 6 Partai Buruh
 - (7) Nomor Urut 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
 - (8) Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 - (9) Nomor Urut 9 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
 - (10) Nomor Urut 10 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
 - (11) Nomor Urut 11 Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
 - (12) Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN)
 - (13) Nomor Urut 13 Partai Bulan Bintang (PBB)
 - (14) Nomor Urut 14 Partai Demokrat
 - (15) Nomor Urut 15 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
 - (16) Nomor Urut 16 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
 - (17) Nomor Urut 17 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - (18) Nomor Urut 24 Partai Ummat
- q) Data pasangan calon Presiden / Wakil Presiden serta Partai politik Pengusung dan Pendukung calon Presiden/Wapres pada Pemilu 2024:
- (1) Nomor Urut 1 H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D dan Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) total 167 kursi.
 - (2) Nomor urut 2 Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Gibran Rakabuming Raka dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) total 261 kursi.
 - (3) Nomor Urut 3 H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P, total 147 kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (128 Kursi DPR RI).

r) Daftar Calon Tetap anggota DPD RI Dapil Sumbar:

NO URUT	NAMA	KET
1.	H. Abdul Aziz, SP., M.M.	
2.	Cerint Iralloza Tasya, S.Ked.	
3.	Desrio Putra	
4.	Dirri Uzhzhulam, (ELOK).	
5.	Hj. Emma Yohanna	
6.	Ir. H. Hendra Irwan Rahim, M.M.	
7.	H. Jelita Donal, Lc.	
8.	Drs. Jhoni Afrizal, DT.HITAM.	
9.	H. Leonardy Harmainy, DT. Bandaro Basa, S.IP.,M.H.	
10.	Mevrizal, S.H., M.H.	
11.	H. Muslim M Yatim, Lc.,M.M.	
12.	Nurkhalis, S.H.	
13.	Yonder WF Alvarent	
14.	Yong Hendri, S.H, DT. Paduko Reno.	
15.	Hj. Yuri Hadiah, S.H.	

s) Berdasarkan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah ditetapkan oleh KPU RI dengan jumlah 243 orang yang terdiri dari 18 partai Nasional dengan rincian:

NO	PARPOL	DAPIL I	DAPIL II	JUMLAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	8	6	14
2	Partai Gerindra	8	6	14
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	6	14
4	Partai Golongan Karya	8	6	14
5	Partai Nasional Demokrat	8	6	14
6	Partai Buruh	8	6	14
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7	3	10
8	Partai Keadilan Sejahtera	8	6	14
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6	4	10
10	Partai Hanura	8	6	14
11	Partai Garda Republik Indonesia	8	6	14
12	Partai Amanat Nasional	8	6	14
13	Partai Bulan Bintang	7	6	13
14	Partai Demokrat	8	6	14
15	Partai Solidaritas Indonesia	8	6	14
16	Partai Perindo	8	6	14
17	Partai Persatuan Pembangunan	8	6	14
18	Partai Ummat	8	6	14
JUMLAH		140	103	243

t) Rekapitulasi Jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Sumbar berdasarkan Partai Politik:

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	JUMLAH DCT		TOTAL
		L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4 6	19	65
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4 5	19	65
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4 4	21	65
4	Partai Golongan Karya	4 2	23	65
5	Partai Nasdem	4 5	20	65
6	Partai Buruh	1 6	8	23
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1 5	10	25
8	Partai Keadilan Sejahtera	4 5	20	65
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1	0	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2 5	13	38
12	Partai Amanat Nasional	4 4	21	65
13	Partai Bulan Bintang	3 3	23	56
14	Partai Demokrat	4 4	21	65
15	Partai Solidaritas Indonesia	1 3	7	20
16	Partai Perindo	1 7	11	28
17	Partai Persatuan Pembangunan	4 5	20	65
24	Partai Ummat	3 7	17	54
JUMLAH		557	273	830

u) Rekapitulasi Jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten / Kota se Provinsi Sumbar berdasarkan Partai Politik:

NO	PARPOL	JUMLAH CALEG	PERSENTASE
1	Partai Kebangkitan Bangsa	585	99,15 %
2	Partai Gerindra	582	98,64 %
3	PDI Perjuangan	582	98,64 %

NO	PARPOL	JUMLAH CALEG	PERSENTASE
4	Partai Golongan Karya	590	100 %
5	Partai Nasdem	587	99,49 %
6	Partai Buruh	126	21,3 %
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	222	37,6 %
8	Partai Keadilan Sejahtera	582	98,64 %
9	Partai Kebangkitan Nusantara	11	1,8 %
10	Partai Hanura	354	60 %
11	Partai Garda Republik Indonesia	66	11,18 %
12	Partai Amanat Nasional	583	98,81 %
13	Partai Bulan Bintang	365	61,86 %
14	Partai Demokrat	574	97,2 %
15	Partai Solidaritas Indonesia	98	16,6 %
16	Partai Perindo	191	32,3 %
17	Partai Persatuan Pembangunan	558	94,5%
18	Partai Ummat	363	61,5 %
JUMLAH		7.019	

- v) Rekapitulasi DCT anggota DPRD Kab/Kota se Provinsi Sumbar berdasarkan Kabupaten dan Kota:

NO	KAB/KOTA	DCT			TMS
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.	Kab. Pesisir Selatan	371	186	557	1
2.	Kab. Solok	265	141	406	3
3.	Kab.Sijunjung	248	140	388	1
4.	Kab.Tanah Datar	268	143	411	0
5.	Kab. Padang Pariaman	305	156	461	1
6.	Kab. Agam	361	204	565	2
7.	Kab. Lima Puluh Kota	301	158	459	0
8.	Kab. Pasaman	242	120	362	0
9.	Kab. Kep. Mentawai	171	99	270	0
10.	Kab. Dhamasraya	175	86	261	2
11.	Kab. Solok Selatan	184	85	269	1
12.	Kab. Pasaman Barat	337	161	498	0
13.	Kota Padang	432	216	648	0
14.	Kota Solok	157	81	238	2
15.	Kota Sawahlunto	120	71	191	2
16.	Kota Padang Panjang	132	76	208	0
17.	Kota Bukit Tinggi	197	113	310	1
18.	Kota Payakumbuh	196	96	292	1
19.	Kota Pariaman	140	85	225	1
JUMLAH		4.602	2.417	7.019	18

w) Jumlah Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2024:

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L + P
1	2	3	6	7	8
1	PESISIR SELATAN	15	189.263	191.359	380.622
2	SOLOK	14	142.514	144.637	287.151
3	SIJUNJUNG	8	86.420	86.462	172.882
4	TANAH DATAR	14	137.985	142.047	280.032
5	PADANG PARIAMAN	17	161.681	164.622	326.303
6	AGAM	16	193.255	194.745	388.000
7	LIMA PULUH KOTA	13	143.841	148.264	292.105
8	PASAMAN	12	108.561	110.007	218.568
9	KEP. MENTAWAI	10	34.262	31.867	66.129
10	DHARMASRAYA	11	84.064	82.923	166.987
11	SOLOK SELATAN	7	65.179	64.249	129.428
12	PASAMAN BARAT	11	147.599	148.655	296.254
13	KOTA PADANG	11	325.912	340.266	666.178
14	KOTA SOLOK	2	27.524	28.308	55.832
15	KOTA SAWAHLUNTO	4	24.865	24.574	49.439
16	KOTA PD. PANJANG	2	21.424	22.058	43.482
17	KOTA BUKIT TINGGI	3	46.726	48.342	95.068
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	50.418	52.050	102.468
19	KOTA PARIAMAN	4	35.867	35.811	71.678
JUMLAH		179	2.027.360	2.061.246	4.088.606

6) Ekonomi

- a) Kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih relatif baik, terlihat dari cukup stabilnya pertumbuhan ekonomi dan terjaganya inflasi di dalam negeri dimana inflasi sekitar 4,2%, pertumbuhan 5,01%. Kemudian juga dalam situasi lain, ekonomi Indonesia dibanding negara lain, *debt to GDP* ratio sekitar 42%. Defisit juga tercatat masih di sekitar 4%, transaksi berjalan 0,5%,"
- b) Neraca Perdagangan Indonesia selama 26 bulan terakhir terus mencatatkan nilai yang positif bahkan surplus. Indonesia juga masih mempunyai cadangan devisa sebesar US\$135 miliar. Situasi domestik relatif baik. Beberapa negara sudah masuk resesi, namun potensi resesi di Indonesia relatif sangat kecil jika dibandingkan negara lain, yaitu sekitar 3%.

c) Stabilitas

- c) Stabilitas sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang meningkat akibat perang Rusia-Ukraina. Pemulihan ekonomi Indonesia tetap terjaga terutama ditopang dengan meredanya atau makin baiknya penanganan Covid-19 dan diikuti oleh pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang kemudian makin mendorong kegiatan perekonomian di dalam negeri.
- d) Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap kuat yang didukung oleh kegiatan konsumsi masyarakat/rumah tangga, kegiatan investasi, serta dukungan belanja pemerintah. Kinerja ekspor yang dalam hal ini mengalami peningkatan sangat signifikan namun tetap harus diwaspadai dengan adanya perkembangan perdagangan ekonomi global dan juga pertumbuhan ekonomi global yang terancam akibat terjadinya perang di Ukraina.
- e) Sejumlah indikator ekonomi masih tercatat baik, seperti indeks keyakinan konsumen, penjualan eceran, *index growth* dari kendaraan penjualan kendaraan bermotor, konsumsi semen dan konsumsi listrik. Dari sisi eksternal, surplus neraca perdagangan meningkat mencapai USD3,83 Miliar. Hal tersebut juga didukung oleh adanya kenaikan surplus neraca perdagangan non migas terutama dengan meningkatnya harga-harga komoditas global seperti batu bara, besi, baja serta CPO.
- f) Cadangan devisa Indonesia pada Maret 2022 mencapai USD 139,1 Miliar atau setara pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri Pemerintah. Cadangan devisa ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
- g) Di sisi nilai tukar, nilai tukar Rupiah Indonesia pada Triwulan I 2022 tetap terjaga dan hanya mengalami sedikit depresiasi sebesar 0,33% secara rata-rata dibandingkan posisi akhir tahun 2021. Depresiasi rupiah tersebut lebih rendah dibandingkan mata uang sejumlah negara berkembang lainnya seperti Malaysia, India, dan Thailand.
- h) *Inflasi* hingga Maret 2022 juga tetap terkendali pada tingkat 2,64% *year on year*. Hal ini didukung oleh masih cukup terkendalinya sisi penawaran di dalam merespon kenaikan permintaan, dan juga tetap terkendalinya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta berbagai respon kebijakan yang dilakukan pemerintah terutama di dalam menjaga barang-barang yang diatur oleh pemerintah.

i) Meskipun

- i) Meskipun demikian, sejumlah risiko rambatan yang berasal dari kondisi global akan berpotensi mempengaruhi dari sisi inflasi, cost of fund, dan kinerja perekonomian. Oleh karena itu KSSK tetap mewaspadaikan dan memantau stabilitas sistem keuangan, untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
- j) Krisis multi dimensional, strategi pembangunan nasional khususnya dibidang perekonomian menggunakan strategi stabilitas ekonomi makro sebagai persyaratan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mengingat masih tingginya resiko ketidak pastian perekonomian dunia dan munculnya hambatan - hambatan terhadap ketersediaan pembiayaan sehingga strategis tersebut sebagai perwujudan *clean goverment* dan *good governance* belum sepenuhnya berhasil, sebagai Indikator stabilitas ekonomi makro antara lain:
- (1) Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 4,8-5, 6% persen, dimana pemerintah akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Angka pertumbuhan tersebut didasarkan pada pertimbangan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, sertapotensi risiko dan tantangan yang dihadapi. Untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus mendorong ekspansi produksi yang konsisten untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian. Investasi harus dipacu serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global, harus ditingkatkan.
 - (2) Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, manajemen kebijakan fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing. Hal itu dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan. Bauran kebijakan yang tepat, serta sinergi dan koordinasi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta penguatan stabilitas sistem keuangan.
 - (3) Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak disekitar Rp14.750 per Dolar AS dan rata-rata suku bunga Surat Utang Negara (SUN)10 tahun diprediksi pada level 7,85 persen.

4) Harga

- (4) Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US Dollar per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari.
 - (5) Pemulihan ekonomi Indonesia dalam tren yang terus menguat, sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh secara ekspansif, didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih serta solidnya kinerja ekspor. Sementara neraca perdagangan telah mengalami surplus selama 27 bulan berturut-turut. Sektor manufaktur yang mengalami pemulihan kuat, berperan menopang tingginya kinerja ekspor nasional. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi hilirisasi industri sejak 2015. Tingginya kinerja ekspor juga didukung oleh sektor pertambangan seiring meningkatnya harga komoditas global.
 - (6) Pada sektor transportasi dan akomodasi yang paling terdampak pandemi mulai mengalami pemulihan. Masing-masing tumbuh 21,3 persen dan 9,8 persen pada Triwulan II 2022. Pada Juli 2022, Indikator *Purchasing Managers' Index (PMI)* meningkat menjadi 51,3 persen, mencerminkan arah pemulihan yang semakin kuat.
- k) Dalam rangka menjaga menjaga stabilitas ekonomi makro dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional ditengah perlambatan ekonomi dunia, kebijaksanaan moneter dititik beratkan pada kestabilan tingkat suku bunga dan pengendalian inflasi, namun disatu sisi kebijaksanaan penerbitan suku bunga obligasi, suku bunga nasional (SBN) dari ORI yang tidak disertai pengawasan yang baik, sehingga menguras devisa negara untuk membayar bunga.
- l) Potensi sumber Daya Energi dan mineral pada tahun 2025 secara nasional diperkirakan akan semakin berkurang disebabkan karena ketersediaan sumber daya energi dan mineral yang semakin berkurang seiring tingginya permintaan pasar internasional disamping lokasi sumber energi dimaksud sangat terbatas dan sebagian besar berada dalam kawasan hutan lindung yang harus tetap dilestarikan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dan sebagai solusinya pada tahun 2023 penggunaan mobil Listrik akan terealisasi walaupun masih dalam tahap pengembangan.
- m) Isu.....

- m) Isu pertambangan mengalami stagnasi dengan tidak adanya investasi baru, karena hambatan-hambatan seperti Isu tumpang tindih lahan tambang dan hutan, lingkungan, otonomi daerah, fiskal, peraturan perundang-undangan yang kurang kondusif, jaminan kepastian hukum dan keamanan serta gangguan kegiatan pertambangan liar.
- n) Kebijakan industri otomotif kurang memberikan peluang tumbuhnya industri otomotif nasional, sehingga peningkatan kendaraan bermotor di Indonesia dipenuhi oleh merk asing, munculnya mobil murah dipasaran Indonesia sehingga penerimaan devisa negara berkurang untuk membayar royalti atas lisensi, disamping sebagian besar industri di Indonesia bermasalah terkait dengan pencemaran lingkungan, penegakan hukum masih lemah, sehingga dikhawatirkan kondisi ini akan terus berkelanjutan dan diperkirakan akan berdampak sosial yang luas.
- o) Kebijakan Liberalisme perdagangan menimbulkan beberapa kendala antara lain Meningkatnya tenaga kerja asing di sektor formal dan bidang jasa sehingga mempersempit peluang kerja bagi masyarakat pribumi itu sendiri karena kalah kompetisi/keahlian.
- p) Perdagangan Bebas ASEAN dan CHINA/Asean-China Free Trade Agreement (AC-FTA) mempengaruhi produk dalam negeri, dimana banyaknya produk dari China masuk ke Indonesia bersaing dengan produk dalam negeri khususnya produk jenis mainan anak-anak, elektronik, tekstil dan produk lainnya, dimana produk China harganya lebih terjangkau dengan kualitas baik, sehingga para konsumen cenderung lebih memilih produk asal China sehingga berdampak pada menurunnya omset pedagang khususnya industri kecil produk dalam negeri.
- q) Kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Sumbar saat ini mengalami kenaikan yang fantastis (Jumlah tahun 2023 jumlah: R.2 sebanyak dan R4/6 2.536.336 unit yang mana mengalami kenaikan rata-rata setiap tahunnya sekitar 0.6 %. sedangkan penambahan jalan setiap tahunnya relatif stagnan / tidak ada penambahan menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas dan naiknya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas setiap tahun khususnya kota - kota besar di Sumbar.

r) Kebijakan

- r) Kebijakan Pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) setiap tahunnya serta akan dihapuskannya subsidi bagi konsumen yang berlangganan 450 s/d 900 KWH terkait dengan makin menipisnya cadangan BBM di dalam negeri serta makin sulitnya bahan alternatif seperti batu bara di Indonesia sebagai bahan dasar pembangkit listrik hal ini diprediksi akan menimbulkan keresahan dan memicu aksi protes/unjuk rasa karena dinilai hal tersebut semakin memberatkan beban hidup masyarakat, selain itu kenaikan tersebut juga akan menambah beban pengusaha pasca kenaikan upah minimum Propinsi yang selalu dituntut oleh para buruh, sehingga dapat memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran karena pengusaha tidak sanggup lagi menjalankan usahanya/bangkrut.
- s) Pembangunan disektor pertanian masih banyak menghadapi kendala antara lain menyusutnya lahan pertanian subur yang tergusur oleh perumahan dan idustrialisasi yang belum diimbangi dengan pengembangan lahan pertanian baru serta upaya modernisasi pertanian belum sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat petani dan ada kecenderungan petani masih senang dengan sistem tradisional.
- t) Potensi terjadinya illegal logging di Sumbar sangat besar yang berdampak dapat merugikan kekayaan negara, terjadi pengrusakan lingkungan hidup, bencana alam banjir yang merugikan masyarakat etap akan terjadi setiap tahunnya, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijaksanaan otonomi daerah yang memberikan porsi lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumberdaya alam di daerahnya disalah artikan sebagai kebebasan untuk dapat dimanfaatkan sumber daya alam hutan tanpa memperhatikan peraturan perundang- undangan serta kurangnya rasa tanggung jawab pejabat berwenang pada proses perijinan dalam pemanfaatan sumber daya hutan serta kurangnya pengawasan hutan serta lemahnya penegakan hukum dibidang kehutanan.
- u) Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Sumatera Barat belum dimanfaatkan secara optimal hal ini disebabkan karena kurangnya modal, kurang iptek yang handal, keterbatasan SDM, sarana dan prasarana penunjang lainnya masih jauh dari memadai sehingga para nelayan belum dapat maksimal untuk memanfaatkan potensi laut yang ada.

v) Keterbatasan

- v) Keterbatasan pemerintah pusat maupun daerah dalam menyediakan lapangan kerja di dalam negeri telah berdampak terhadap animo untuk mencari pekerjaan ke luar negeri secara legal maupun illegal, sehingga tidak sering terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul khususnya pekerja yang bekerja di luar negeri, sedangkan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri belum terimplikasi secara baik/optimal.
- w) Perekonomian Sumatera Barat triwulan II-2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp77,92 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp47,51 triliun.

Ekonomi Sumatera Barat triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2022 tumbuh sebesar 5,14 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,12 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 7,15 persen.

Sumatera Barat triwulan II-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,82 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 12,08 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 38,88 persen.

7) Sosial Budaya

- a) Pembangunan kehidupan umat beragama di sumbar telah mampu mempermudah, memperluas dan mengembangkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing, namun masih bersifat formalistik dan belum mampu meningkatkan keberimanan dan spritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan, sehingga muncul gejala fanatisme sempit sehingga cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan partai politik) atau munculnya aliran/kepercayaan baru yang dinilai sesat dan menyesatkan seperti yang pernah terkjadi di Sumbar antara lain:
- (1) Ajaran islam Jamaah/LDII.

- (2) Ajaran islam Darul Arqam.
 - (3) Ajaran Ahmadiyah.
 - (4) Ajaran Agama Bahai, aliran sesat sempalan Syiah.
 - (5) Aliran pelindung kehidupan
 - (6) Tauhid Ibrahim
 - (7) BAB Kesucian
- b) Kemajemukan adat dan budaya daerah serta keindahan alam merupakan potensi nasional yang mempunyai daya tarik terhadap wisatawan asing untuk berkunjung di sumbar, namun apabila hal tersebut tidak dikelola dengan baik merupakan potensi timbulnya konflik ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat Sumatera Barat/Minangkabau yang hidup dilingkungan adat dan budaya yang khas memiliki falsafah hidup adat yang berdasarkan “Adat Basandi sara’ dan sara’ basandi Kitabullah” yang artinya adat ditopang oleh Sara’ (Agama) dan agama ditopang oleh Kitabullah (Al-quran). Makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa setiap pola sikap dan pola tindak masyarakat akan selalu diukur dengan kepatutan menurut adat dan agama Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi juga telah ikut menerpa masyarakat Sumatera Barat yang berakibat terjadinya perubahan-perubahan sosial atau terjadi pergeseran status sosial di masyarakat sumbar, hal ini disebabkan karena membaurnya pendatang - pendatang dengan penduduk asli suku Minangkabau yang dapat berpotensi timbulnya konflik horizontal maupun vertikal.
- c) Transformasi budaya dalam proses modernisasi tidak dapat dihindarkan dan cenderung semakin berpengaruh luas pada sistem nilai, norma dan tata laku masyarakat yang dapat menimbulkan gejala krisis identitas, penamaan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bersumber dari kebhinekaan masyarakat telah dilakukan secara berkelanjutan, namun belum mampu menjadi andalan untuk menangkal dan menyaring pengaruh budaya asing.
- d) Perkembangan masyarakat yang mengarah kepada sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa saat ini antara lain: Individualistis, Materialistis, komsumtif, perilaku anarkis destruktif, merosotnya nilai-nilai budi pekerti, kepedulian sosial, kegotong royongan, persatuan dan kesatuan bangsa, gaya hidup bebas serta menurunnya kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat.

- e) Organisasi masyarakat/LSM, UU keormas sebagai salah satu landasan hak-hak setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat, apabila pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan kaedah hukum dapat menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: persaingan antar ormas yang dapat berujung pada bentrokan fisik antar kelompok/antar organisasi.
- f) Pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kaum perempuan dan anak didominasi oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan penerapan Konvensi Hak Anak (KHA) dan undang-undang perlindungan anak belum terealisasi dengan baik, akibatnya kasus kekerasan yang terjadi pada anak seperti Eksploitasi anak untuk bekerja sebagai pengemis, pekerja seks komersial, pelaku kriminalitas jalanan yg dilakukan anak-anak serta kekerasan berupa seksual, fisik dan phisikis yang dilakukan oleh orang tua kandung/tiri, teman, tetangga, guru dan keluarga lainnya cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- g) Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam strategis yang ada di daerah serta pemanfaatannya cenderung mementingkan perekonomian daerah pada jangka pendek serta masih terjadinya pengelolaan sumber daya alam secara illegal (penambangan liar dan kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan) yang dapat mengorbankan kepentingan jangka panjang dengan terjadinya kerusakan lingkungan hidup (pencemaran air, penurunan kondisi hutan, kerusakan DAS, kerusakan habitat ekosistem pesisir laut, ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan terjadinya pemanasan global).
- h) Kasus pertanahan di sumbar pada awalnya hanyalah merupakan persoalan hukum sederhana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat setempat, namun dalam perkembangannya permasalahan pertanahan menjadi berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang dapat berdampak luas mengganggu stabilitas nasional, yang penanganannya harus diselesaikan secara komprehensif.
- i) Ketenagakerjaan, Aksi unjuk rasa elemen buruh dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan dengan meminta kenaikan UMP/UMR diprediksi akan terus berlanjut setiap tahunnya sejalan dengan makin tingginya kebutuhan hidup sehari-hari yang dirasakan oleh masyarakat sehingga gaji buruh tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari- hari.

- j) Peraturan Menteri Agama RI dan Mendagri No. 08 dan nomor 09 tahun 2006 Bab.IV pasal 13 dan 14 tentang pendirian tempat ibadah (penutupan tempat ibadah yang dinilai tidak memiliki izin) telah menimbulkan kontroversi di masyarakat antara yang pro maupun yang kontra, sehingga berakibat rentan terjadinya konflik antar penganut agama, yang merupakan potensi bagi timbulnya gangguan kamtibmas.
- k) Potensi terjadinya kasus sengketa tanah di Sumatera Barat cukup tinggi dimana penyelesaiannya sangat rumit dan memerlukan waktu yang sangat panjang hal tersebut bila dibiarkan berlarut-larut berpotensi terhadap terjadinya gangguan kamtibmas berupa pendudukan tanah oleh massa, pencurian hasil kebun milik perusahaan pada saat panen oleh masyarakat, terjadinya pembakaran/pengrusakan aset perusahaan, sampai dengan terjadinya penganiayaan atau pembunuhan.
- l) Adanya organisasi/kelompok garis keras yang berada di wilayah Sumatera Barat yang kegiatannya senantiasa sering berseberangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang perlu diwaspadai walaupun beberapa organisasi tersebut sudah di bubarkan oleh Pemerintah di antara FPI namun organisasi–organisasi lain yang harus di waspadai Antara lain:
- Organisasi MMI (Majelis Mujahidin Indonesia)
 - Organisasi HTI (Hizburt Tahir Indonesia).
 - Organisasi KPSI (Komite Penegak Sariah Islam).
 - Organisasi FMPI (Forum Musyawarah Pembela Islam)
 - Organisasi GMM (Gerakan Muslim Minang).
 - Organisasi FMM (Forum Masyarakat Minang Kabau).
 - Organisasi Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)
 - Presidium Alumni (PA) 212
- m) Maraknya akhir - akhir ini pemberitaan tentang pembentukan negara Khilafah di Indonesia dimana Khilafah Islamiyah merupakan konsep pemerintahan yang pada akhir-akhir ini kembali mengemuka dan menjadi tuntutan sebagian umat Islam. Mengemukanya kembali tuntutan umat Islam atas pelaksanaan dan pengelenggaraan negara yang didasarkan pada syariah Islam tidak bisa dilepaskan dari kegagalan kalangan nasionalis sekuler. Dalam perkembangannya konsep pembentukan negara khilafah islamiyah bertentangan dengan ideologi bangsa indonesia yang mendasarkan pancasila sebagai dasar negara bukan agama yang menjadi dasar negara. Di Sumatera Barat terdapat beberapa daerah yang mempunyai basis Khilafatul Muslimin maupun Negara Islam Indonesia diantaranya

Kota Padang, Dharmasraya, Sijunjung, Solok, Bukittinggi, Tanah Datar, Payakumbuh, dan Lima Puluh Kota.

8) Keamanan

a) Konflik Sosial

(1) Konflik Horizontal dan Vertikal.

Konflik horizontal dan vertikal dengan latar belakang berbagai permasalahan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya) bila tidak ditangani secara tepat dapat menimbulkan gangguan kamtibmas, berbagai penyebab terjadinya gangguan kamtibmas di Sumbar di tahun 2022/2023 dilatar belakang beberapa permasalahan diantaranya adalah:

- (a) Kondisi masyarakat di Sumbar yang majemuk terdiri dari berbagai macam suku, agama dan budaya serta adat istiadat yang cenderung dimunculkan sikap primordialisme/kedaerahan merasa lebih dari yang lain sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial cukup tinggi.
- (b) Tuntutan reformasi terhadap demokrasi, HAM, lingkungan hidup, supremasi hukum dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum (sesuai Undang - undang no.9/1998) dalam pelaksanaannya masyarakat sering melanggar rambu - rambu hukum dan melakukan tindakan anarkhis.
- (c) Perbedaan pemahaman dan pelaksanaan ibadah antar dan intra penganut agama serta pendirian tempat ibadah dapat menimbulkan konflik atau protes oleh kelompok agama mayoritas yang dapat berakhir dengan tindakan anarkhis.
- (d) Terjadinya konflik sosial di masyarakat Sumatera Barat mayoritas dipicu tentang permasalahan tanah ulayat yang disengketakan antara ninik mamak satu suku dengan ninik mamak suku lainnya , antara ninik mamak dengan perusahaan, perebutan batas wilayah/area antara kelompok satu dengan kelompok lainnya yang penyelesaiannya tidak tuntas sehingga rentan terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.

NO	KESATUAN	PERMASALAHAN								JML
		POLITIK	EKONOMI	SOSBUD	KAM	SARA	BATAS WIL	LAHAN	SDA	
18.	SOLSEL				1					1
19.	MENTAWAI			3						3
JUMLAH			10	77	12	0	1	5	0	105

(3) Data Unjuk Rasa 2023

NO	KESATUAN	BIDANG				JUMLAH
		POLITIK	EKONOMI	SOSBUD	KAM	
1.	RESTA PADANG	1	12	62	4	79
2.	RESTA BUKITTINGGI			8		8
3.	RES PAYAKUMBUH		1	2		3
4.	RES PASBAR		5	9	2	16
5.	RES SOLOK KOTA		2	1		3
6.	RES PARIAMAN			3	1	4
7.	RES PASAMAN	1		1		2
8.	RES PD.PARIAMAN		1	3		4
9.	RES TANAH DATAR			1	1	2
10	RES AGAM		5	3		8
11	RES PD. PANJANG			3		3
12	RES SAWAHLUNTO					0
13	RES SOLOK		2	5		7
14	RES PESSEL	4	9	3	1	17
15	RES DHARMASRAYA		6	2	1	9
16	RES SIJUNJUNG					0
17	RES 50 KOTA	1		3		4
18	RES SOLSEL					0
19	RES MENTAWAI		1			1
JUMLAH		7	44	109	10	170

b) Terorisme

- (1) Kegiatan teroris di Indonesia sampai tahun 2025 mendatang diperkirakan masih tetap eksis walaupun beberapa pelaku telah tertangkap dan ditembak mati akibat operasi yang dilakukan oleh Densus 88 anti terror, namun jaringan terorisme di Indonesia diperkirakan tidak akan habis dalam waktu beberapa tahun kedepan
- (2) Munculnya kelompok garis keras lainnya seperti Islamic State of Irak and Syria (ISIS) diberbagai negara dunia termasuk Indonesia yang saat ini kelompok tersebut telah menunjukkan eksistensinya dengan cara melakukan peperangan secara terbuka di Irak dan Suriah serta melakukan propaganda di seluruh dunia melalui media sosial sehingga mampu mempegaruhi masyarakat yang minim akan pengetahuan agama sehingga banyak masyarakat yang ikut bergabung ke

ISIS dengan alasan untuk meningkatkan ekonomi keluarga sekaligus berjihat kejalan allah untuk memerangi kafir sehingga bila meninggal akan masuk surga.

- (3) Doktrinasi yang dilakukan oleh kelompok terorisme dengan cara penanaman fahan-faham radikalisme, anti terhadap pemerintah dan sistem demokratisasi yang dilaksanakan secara langsung ataupun memanfaatkan sarana media massa terutama internet, melakukan rekrutmen terhadap masyarakat yang mudah untuk dipengaruhi terutama masyarakat kalangan ekonomi lemah, masyarakat yang sedang menjalani hukuman dilembaga pemasyarakatan, kalangan masyarakat yang menjadi korban terkait dengan kebijaksanaan pemerintah, masyarakat eks narapidana bahkan sampai dengan kalangan masyarakat terpelajar, serta upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku terorisme masih belum optimal sehingga para pelaku terorisme yang telah selesai menjalani hukuman kembali lagi melakukan kegiatannya, aksi-aksi terorisme kedepan akan tetap eksis di Indonesia.
- (4) Perkembangan terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok terorime saat ini terkait dengan metode dan strategi yang digunakan dapat dikatakan telah mengalami pergeseran terutama dari obyek yang dijadikan sasaran yang semula adalah yang terkait dengan kepentingan asing terutama kepentingan amerika serikat dan sekutunya, untuk saat ini obyek yang dijadikan sasaran adalah aset kepentingan nasional termasuk aparat penegak hukum dalam hal ini TNI, Polri, PNS yang selama ini dianggap sebagai thogut penghambat utama perjuangan kelompok terorisme.
- (5) Kelompok teroris dalam melakukan kegiatan memerlukan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, sarana perekrutan sampai dengan sarana operasional lainnya seperti dukungan senjata terutama senjata api, bahan peledak yang dapat dirakit menjadi bom serta sarana kebutuhan akomodasi lainnya yang semuanya itu dibutuhkan dukungan pendanaan, sehingga kelompok terorisme akan melakukan kegiatan-kegiatan fa'i dengan cara melakukan kegiatan aksi-aksi kriminal seperti pencurian, perampokan dengan bersenjata.
- (6) Kegiatan terorisme di Sumbar secara umum relatif aman, namun embrio pelaku terorisme telah ditemukan di Sumbar, hal itu dibuktikannya ada beberapa terduga Teroris yang di Tangkap Densus 88 AT Mabes Polri tahun sepanjang tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

- ❖ Penangkapan dilakukan di Wilkum Polres Tanah Datar sebanyak 1 (satu) orang dengan identitas:
RISKA AYULITA, Padang, 27 Juni 1990 (33 tahun), Ibu Rumah Tangga, Perum KPN Jorong Saruaso Barat, Kec. Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar

Dengan kronologis dan peran:

Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 12.22 Wib di Jln Sutan Alam Bagagarsyah depan Kantor BPCB Tanah Datar Satgas Densus 88 AT Mabes Polri Wilayah Sumbar telah melakukan penangkapan terhadap Satu orang terkait Dugaan Tindak Pidana Terorisme.

Pada pukul 13.25 Wib s/d 14.13 Wib dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal tersangka dengan BB yang ditemukan:

- HP 4 unit dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah Buku catatan
- 11 (sebelas) buah Kartu Smartfren.

Adapun tersangka (yang diduga terkait jaringan JAD) merupakan jaringan yang beraksi dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan paham Radikal/terorisme serta tutorial untuk membuat senjata api dan bom.

- (7) Eks Napiter yang berada di Wilayah Hukum Polda Sumbar yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, 17 (tujuh belas) orang berdomisili di Kota Padang, 8 (delapan) orang berdomisi di Kota Payakumbuh, 6 (enam) orang berada di Kabupaten Tanah Datar, 1 (satu) orang berada di kota Padang Panjang, 1 (satu) orang berada di Kota Bukittinggi, 2 (dua) orang berada di Kota Solok, 2 (dua) orang berada di Kab Solok, 1 (satu) orang berada di Kabupaten Solok Selatan, 1 (satu) orang berada di Kab Pasaman, 1 (satu) orang berada di Kab Pesisir Selatan, 3 (tiga) orang berada Kab Agam.
 - (8) Dari 44 orang eks napiter tersebut 14 (empat belas) orang diantaranya masih berstatus merah atau masih berpaham radikal dan terorisme yang masih berpotensi melakukan kegiatan dan aksi terorisme dan menjadi ancaman bagi keamanan kamtibmas di wilkum Polda Sumbar.
- c) Lemahnya pengawasan lautan sebagai pintu masuk wilayah Indonesia khususnya Sumbar serta kedekatannya secara geografis dengan australia (salah satu negara yang pemberi suaka) telah

dimanfaatkan oleh para sendikat imigran gelap untuk menuju Australia melewati perairan Sumatera Barat (kepulauan Mentawai).

- d) Trend Perkembangan situasi kamtibmas dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir di Wilayah Sumatera Barat dilihat dari jumlah gangguan kamtibmas sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- (1) Data jenis kejahatan tahun 2020 s/d 2023 (1 Januari- 28 Nov 2023).

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1.	Kej.Konvensional	9.405	5.564	5.124	10.346
2.	Kej.Transional	0	0	1.049	1.262
3.	Kej.Thdp Kekayaan negara	184	72	74	79
4.	Kej.Berinflikasi Kontijensi	0	0	0	7
JUMLAH		9.589	5.636	6.247	11.694

- (2) Data kasus menonjol tahun 2020 s/d 2023 (1 Januari- 28 Nov 2023).

NO	KASUS	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1.	Curat	1.416	576	685	852
2.	Curanmor	902	443	365	248
3.	Penipuan	415	257	263	470
4.	Curas	176	77	77	65
5.	Anirat	322	252	317	1605
6.	Perusakan	192	126	82	123
7.	Kebakaran/ Pembakaran	67	19	10	16
8.	Pembunuhan	20	4	6	15
9.	Perjudian	107	121	278	60
10.	Narkoba	968	884	1.162	1.207
11.	Perkosaan	31	22	19	29
Jumlah		4.616	2.785	3.264	4.690

c). Data.....

- (3) Data Laka Lantas tahun 2018 s/d 2023 (1 Januari- 28 Nov 2023).

NO	TAHUN	JUMLAH	KORBAN			RUGI MATERIL
			MD	LB	LR	
1.	2018	2.561	411	274	3.908	Rp. 7.732.700.000
2.	2019	3.336	530	304	4.853	Rp. 6.911.705.000
3.	2020	2.554	454	231	3.537	Rp. 7.127.905.000
4.	2021	2.412	397	204	3.441	Rp. 8.361.870.000
5.	2022	3.305	495	299	4.700	Rp. 9.758.270.000
6.	2023	3.328	286	187	3.649	Rp. 9.339.040.000

- (4) Data Langgar Lantas tahun 2018 s/d 2023

NO	TAHUN	JUMLAH LANGGAR	DENDA
1.	2018	70.712	Rp.5.727.112.900
2.	2019	99.492	Rp.7.089.478.300
3.	2020	129.765	Rp.8.617.652.065
4.	2021	73.836	Rp.5.058.142.500
5.	2022	63.701	Rp. 4.554.403.700
6.	2023	47.173	Rp. 3.129.283.500

- (5) Rangka Kerawanan daerah gangguan kamtibmas tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	POLRES/TA	JUMLAH KEJAHATAN	RANGKING/ PERINGKAT
1	POLRESTA PADANG	3.645	I
2	POLRES PASAMAN BARAT	1.255	II
3	POLRES PESISIR SELATAN	899	III
4	POLRES SOLOK KOTA	879	IV
5	POLRES PADANG PARIAMAN	871	V
6	POLRES PAYAKUMBUH	738	VI
7	POLRES DAMASRAYA	637	VII
8	POLRES PARIAMAN	560	VIII
9	POLRESTA BUKIT TINGGI	545	IX
10	POLRES LIMA PULUH KOTA	478	X
11	POLRES AGAM	443	XI
12	POLRES TANAH DATAR	432	XII
13	POLRES PASAMAN	397	XIII
14	POLRES PADANG PANJANG	381	XIV
15	POLRES SIJUNJUNG	361	XV
16	POLRES SOLOK	335	XVI

17	POLRES SOLOK SELATAN	227	XVII
18	POLRES SAWAHLUNTO	116	XVIII
19	POLRES KEP MENTAWAI	59	XIX

- e) Tingkat angka kriminalitas setiap tahunnya di Sumatera barat condong menunjukkan peningkatan secara signifikan baik dilihat dari angka kejadian/kuantitas maupun kualitas khususnya kejahatan konvensional seperti Curat, Curas, Curanmor dan penipuan.
- f) Disamping itu ada beberapa kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar diantaranya penanganan illegal minning, illegal logging, perebutan lahan perkebunan, kasus kriminal (pembunuhan, curat dan curas) yang akan mempengaruhi situasi dan kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polda Sumbar
- g) Meningkatnya keberadaan orang asing di wilayah Sumatera Barat baik sebagai tenaga ahli asing secara legal maupun illegal dapat memicu keresahan masyarakat akibat minimnya lapangan kerja yang tersedia sehingga memunculkan rasa antipati terhadap orang asing yang datang ke Sumbar karena kalah bersaing.
- h) Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rentan terjadinya gempa bumi baik didarat maupun dilaut disebabkan wilayah sumbar terletak diatas lempeng eurasia dan lempeng australia yang terdapat beberapa retakan/patahan antara lain : retakan/patahan disepanjang pulau sumatera (patahan semangka) mulai dari wilayah Aceh sampai ke Lampung serta Letak Geografis Daerah Sumatera Barat dalam jajaran garis Khatulistiwa sangat berpengaruh langsung pada kondisi iklim. Dengan posisi pada Garis Khatulistiwa maka keadaan cuaca secara umum beriklim tropis namun pada bulan-bulan tertentu seperti pada bulan Februari s/d Juli merupakan musim kemarau yang rentan terjadinya Karhutla serta pada bulan September s/d Januari merupakan musim penghujan dengan curah hujan yang cukup tinggi sehingga rentan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor maupun angin puting beliung hampir disemua daerah kabupaten / kota. Berikut data bencana alam dan Karhutla selama tahun 2023:

NO	KESATUAN	LONGSOR	GUNUNG MELETUS	BANJIR	BANJIR BANDANG	ANGIN PUTING	GEMPA BUMI	KARHUTLA	ABRASI	JML
1.	PADANG	8		3		7	1			19
2.	BUKITTINGGI	6	2	0			1			9
3.	PAYAKUMBUH	2		0						2
4.	PASBAR	0		2						2
5.	SOLOK KOTA	0		0						0
6.	PARIAMAN	5		3		5				13
7.	PASAMAN	3		2	1	1				7
8.	PD.PARIAMAN	3		4		1				8
9.	TANAH DATAR	5	6	1				1		13
10.	AGAM	12		2		6				20
11.	PD. PANJANG	6	4	1		4				15
12.	SAWAHLUNTO	2		0						2
13.	SOLOK	2		0						2
14.	PESEL	6		7		3		8		24
15.	DHARMASRAYA	1		5				14		20
16.	SIJUNJUNG	1		0		1				2
17.	50 KOTA	7		3		2		3		15
18.	SOLSEL	2		1						3
19.	MENTAWAI	2		2						4
	JUMLAH	73	12	36	1	30	2	26		180

b. Analisis

Pelaksanaan tugas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal, sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Penilaian AKIP Itwasda Polda Sumbar tahun 2023 oleh APIP Polda Sumbar mendapat kategori BB dengan nilai (72,78). Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber). Masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. Tren peningkatan kejahatan, Curat, Curas, Curanmor, Penipuan, Narkoba dan Kriminal lainnya yang menuntut Polri untuk lebih optimal dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum.

2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Itwasda Polda Sumbar seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, nasional dan regional akan semakin berat dan kompleks. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja dan pelayanan di bidang kepolisian semakin tinggi, mengharuskan menyusun berbagai upaya dan aksi konkrit yang efektif dalam membantu mewujudkan Keamanan di Provinsi Sumatera Barat. Secara umum permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi pada Tahun 2025 dan khususnya pada satker Itwasda Polda Sumbar adalah sebagai berikut:

- a. Personel yang dimutasikan ke jajaran Itwasda Polda Sumbar sebagai Parik/Auditor belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang auditing;
- b. Masih adanya beberapa pengawasan melekat para Kasatwil kepada satuan bawah dirasakan lemah sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran disiplin anggota serta penyimpangan pelaksanaan tugas;
- c. Masih adanya para pengguna anggaran/pelaksana kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan anggaran (RPD) masing-masing Satker dan Satwil Polda Sumbar sehingga berdampak terhadap program dan kegiatan serta pencapaian target kinerja dengan output kegiatan yang menjadi belum optimal;
- d. Adanya penugasan yang bersifat tumpang tindih antara tugas yang telah dijadwalkan secara rutin dengan penugasan yang sifatnya kontijensi/darurat;
- e. Adanya dampak pelaksanaan pemilu Pilpres, legislatif dan Pilkada serentak tahun 2024 yang berdampak terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi

- a. Visi Polda Sumatera Barat dan Visi Itwasda Polda Sumatera Barat

- 1) Visi Polda Sumatera Barat

“Polda Sumbar yang Modern, Profesional, dan Berintegritas menuju Provinsi yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

2) Visi Itwasda Polda Sumatera Barat

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan, Audit, Reviu dan Klarifikasi secara Modern, Professional, Berintegritas, Maju dan Berkelanjutan”.

b. Misi Polda Sumatera Barat dan misi Itwasda Polda Sumatera Barat

1) Misi Polda Sumatera Barat

Dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Polri, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun dalam misi sebagai berikut:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah provinsi Sumatera Barat;
- b) Menegakan hukum secara transparan dan berkeadilan;
- c) Melindungi, Melayani dan Mengayomi kepada masyarakat secara modern, humanis dan setara.

2) Misi Itwasda Polda Sumatera Barat

sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun dalam misi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan peningkatan kemampuan APIP yang berkualitas dan professional dengan mengikuti diklat secara bertahap dan berkesinambungan;
- b) Melaksanakan kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;
- c. Melaksanakan kegiatan Verifikasi terhadap adanya mutasi kepala satuan kerja ketempat yang baru sehingga pelaksanaan kinerja pejabat yang lama dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Melaksanakan reviu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan

melaksanakan evaluasi untuk tersedianya informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai;

- e. Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan, klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan dan penelitian setiap pengaduan.

2. Tujuan jangka menengah

a. Tujuan Polda Sumatera Barat

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Proinsi Sumatera Barat;
- 2) Mewujudkan kepercayaan masyarakat dalam proses penegakan hukum yang adil, humanis, setara dan transparan (Equality before the law);
- 3) Mewujudkan SDM Polri yang profesional dan berintegritas;
- 4) Membangun sarana dan prasarana Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan;
- 5) Menerapkan manajemen Polri yang akuntabel dan berintegritas dalam organisasi Polri yang rasional, agile dan modern.

b. Tujuan Itwasda Polda Sumatera Barat

1. Meningkatkan kemampuan APIP yang berkualitas, professional, dan modern;
2. Terlaksananya kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu sehingga dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tugas dan fungsi Polda Sumbar;
3. Terselenggaranya kegiatan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru secara transparan dan akuntabel;
4. Terselenggaranya kegiatan reviu dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan sehingga menghasilkan laporan satker yang berkualitas;

5. Terselenggaranya pelayanan dumas dan terselesainya dumas secara agile, modern, akuntabel dan berintegritas dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Sasaran Prioritas Tahun 2025

a. Sasaran prioritas Polda Sumatera Barat tahun 2025

- 1) Terwujudnya kerja sama polisi, masyarakat dan stakeholder dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara proaktif;
- 2) Terwujudnya profesionalisme Polri dalam mendeteksi potensi gangguan Kamtibmas;
- 3) Terwujudnya kemampuan Polri dalam menanggulangi secara cepat dan tepat gangguan Kamtibmas;
- 4) Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
- 5) Terwujudnya pelayanan penanganan perkara yang adil, humanis, setara dan transparan;
- 6) Terwujudnya penegakan hukum yang adil, humanis, setara dan transparan;
- 7) Tuntasnya penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana berdasarkan Scientific Crime Investigation;
- 8) Terwujudnya pengelolaan SDM yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- 9) Terwujudnya SDM Polri yang profesional dan berintegritas;
- 10) Terintegrasinya sistem informasi Polri berbasis big data dan mudah diakses;
- 11) Terwujudnya almatsus, perbekalan dan fasilitas konstruksi Polri yang modern dan memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi berbasis MEPE (Minimum Essential Police Equipment);
- 12) Terwujudnya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Polri yang efektif, efisien dan akuntabel;
- 13) Terwujudnya organisasi Polri yang rasional, agile dan modern;
- 14) Terwujudnya budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas Kepolisian;

- 15) Terwujudnya citra Polri yang positif dan regulasi yang harmonis dalam mewujudkan budaya hukum Masyarakat.
- b. Sasaran prioritas Itwasda Polda Sumatera Barat tahun 2025
- 1) Menjadikan personel APIP yang berkualitas, professional, dan modern;
 - 2) Seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar menjadi taat, hemat, efisien, dan efektif dalam pencapaian tugas dan fungsi;
 - 3) Setiap Kasatker dan Kasatwil yang akan melaksanakan serah terima jabatan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pada bidang opsnal, SDM, sarpras, dan keuangan;
 - 4) Seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar yang direviu dan evaluasi sehingga laporan dapat diyakini;
 - 5) Setiap pengaduan masyarakat yang dilaporkan baik langsung maupun tidak langsung dapat ditindak lanjuti serta terwujudnya organisasi Polri yang rasional, agile dan modern.

III. Arah kebijakan dan strategi Tahun 2025

1. Arah kebijakan dan strategi Polda Sumbar Tahun 2024

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Sumatera Barat Tahun 2025, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **strategis** Terwujudnya kerja sama polisi, masyarakat dan *stakeholder* dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara proaktif, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Peningkatan edukasi dan kolaborasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan dengan strategi:
 - a) Modernisasi sistem komunikasi dan edukasi untuk meningkatkan kolaborasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan;
 - b) Memperkuat strategi Polmas (Community Policing) dalam mencegah kejahatan dan memelihara Kamtibmas.

2) Peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam Harkamtibmas.

Meningkatkan sistem kerja sama K/L yang efektif, efisien dan terintegrasi untuk mewujudkan peran Polri di bidang Harkamtibmas;

b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **strategis** Terwujudnya profesionalisme Polri dalam mendeteksi potensi gangguan Kamtibmas , untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu :

1) Peningkatan kualitas bank data dan modernisasi sistem pelayanan publik bidang intelijen.

a) Meningkatkan kualitas bank data dan informasi intelijen yang terintegrasi dari Polsek sampai MabesPolri;

b) Modernisasi sistem pelayanan publik bidang intelkam dengan database yang terintegrasi diseluruh wilayah.

2) Kecepatan dan ketepatan deteksi aksi.

Modernisasi sistem deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) dalam menurunkan dan mengeliminir setiap potensi gangguan Kamtibmas.

c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **strategis** Terwujudnya kemampuan Polri dalam menanggulangi secara cepat dan tepat gangguan Kamtibmas, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu:

1) Modernisasi sistem pengamanan yang terintegrasi.

a) Modernisasi sistem pengamanan dalam negeri yang terintegrasi dengan K/L dan stakeholder terkait berbasis Artificial Intelligence.

b) Modernisasi sistem dan metode operasional serta kesiapan personel untuk Harkamtibmas di seluruh Indonesia.

2) Modernisasi kemampuan Polri dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas.

- a) Memetakan karakteristik ambang gangguan (police hazzard) Kamtibmas wilayah serta memodernisasi kemampuan pengamanan secara terintegrasi.
 - b) Modernisasi operasional kepolisian air dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas, menjaga kekayaan alam Indonesia dan mengamankan wilayah perairan Indonesia.
- 3) Modernisasi kemampuan Polri dalam menanggulangi gangguan keamanan berintensitas tinggi.
- a) Modernisasi kemampuan Korbrimob Polri dalam menanggulangi gangguan keamanan berintensitas tinggi di seluruh wilayah.
 - b) Modernisasi sistem & teknologi pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan radikalisme dan tindak pidana terorisme.
- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **strategis** Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu:
- Modernisasi sistem & teknologi manajemen lalulintas di seluruh wilayah.
- a) Modernisasi sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh kota/ kabupaten.
 - b) Modernisasi sistem registrasi dan identifikasi kendaraan dan pengemudi, serta meningkatkan standar mutu pelayanan masyarakat bidang lalu lintas.
 - c) Modernisasi sistem & teknologi penegakan hukum pelanggaran dan kejahatan lalu lintas berbasis elektronik khususnya di kota-kota besar.
- e. Mewujudkan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **strategis** Terwujudnya pelayanan penanganan perkara yang adil, humanis, setara dan transparan, maka arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu :

Modernisasi pelayanan penanganan perkara yang humanis, setara, transparan, adil dan mudah diakses.

Modernisasi pelayanan penanganan perkara yang lebih humanis, setara, transparan, adil dan mudah diakses dengan memanfaatkan teknologi informasi.

f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **strategis** Terwujudnya penegakan hukum yang adil, humanis, setara dan transparan., untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu:

1) Penataan kebutuhan regulasi serta modernisasi sistem & teknologi penegakan hukum.

Memetakan dan menata kebutuhan perubahan regulasi serta modernisasi sistem & teknologi penegakan hukum sesuai dinamika tantangan terkini.

2) Peningkatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana.

Membangun paradigma baru untuk mengedepankan upaya-upaya restorative justice dalam penanganan tindak pidana.

3) Modernisasi sistem & teknologi penanganan kejahatan siber.

Modernisasi sistem & teknologi kepolisian dalam menangani kejahatan siber (cyber enabled crime & cyber dependent crime).

g. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **strategis** Tuntasnya penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana berdasarkan *Scientific Crime Investigation*, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu:

1) Peningkatan kapabilitas penyelidikan dan penyidikan berbasis *Scientific Crime Investigation*.

Memaksimalkan proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana berbasis *Scientific Crime Investigation* dengan memanfaatkan laboratorium forensik kepolisian, kedokteran kepolisian, identifikasi kepolisian dan informasi kriminal.

2) Terbangunnya sistem, perangkat keras dan perangkat lunak database DNA di Puslabfor Bareskrim Polri dan seluruh Bidlabfor Polda.

Modernisasi sistem jaringan dan aplikasi database DNA serta instalasi peralatan khusus yang terintegrasi di Puslabfor Bareskrim Polri dan seluruh Bidlabfor Polda.

h. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **strategis** Terwujudnya pengelolaan SDM yang mandiri, profesional dan berintegritas, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu:

1) Modernisasi sistem pengelolaan SDM Polri di Pusat dan Kewilayahan.

a) Modernisasi sistem pengelolaan SDM Polri di Pusat dan Kewilayahan.

b) Meningkatkan sistem pembinaan karir berbasis meritokrasi dan program manajemen talenta Polri dalam mengembangkan jalur karir struktural maupun fungsional.

c) Meningkatkan sistem perekrutan, pemenuhan, pengendalian jumlah, dan penataan komposisi SDM Polri sesuai kualifikasi dan kebutuhan.

2) Modernisasi sistem perawatan SDMPolri.

Modernisasi sistem pelayanan hak-hak personel dan layanan psikologi.

3) Modernisasi sistem layanan kesehatan dan kedokteran.

Modernisasi layanan kesehatan dan kedokteran kepolisian berbasis digital.

i. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **strategis** Terwujudnya SDM Polri yang profesional dan berintegritas, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu:

Modernisasi pendidikan dan pelatihan Polri

1) Modernisasi sarana prasarana, penyelenggaraan, kurikulum dan bahan ajar Diklat sesuai perkembangan teknologi, dinamika

tantangan dan internalisasi budaya Polri.

- 2) Modernisasi sistem sertifikasi kompetensi secara terintegrasi di Pusat dan Wilayah.

j. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **strategis** Terintegrasinya sistem informasi Polri berbasis big data dan mudah diakses, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Integrasi sistem TIK Polri.

Mengintegrasikan sistem informasi Polri antara seluruh satker pusat dan wilayah (big data) untuk meningkatkan pelayanan prima baik internal maupun eksternal.

- 2) Pengintegrasian data kriminalitas/ Sistem Informasi Kriminal Nasional.

Mengintegrasikan database kriminalitas seluruh satker Polri, Institusi Penegak Hukum lainnya serta Kementerian/ Lembaga Terkait.

k. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **strategis** Terwujudnya almatsus, perbekalan dan fasilitas konstruksi Polri yang modern dan memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi berbasis MEPE (*Minimum Essential Police Equipment*). maka arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu:

Modernisasi almatsus, perbekalan dan fasilitas konstruksi.

- 1) Menginventarisir, menata sistem pemenuhan dan pemeliharaan almatsus Polri yang modern sesuai MEPE.
- 2) Menginventarisir dan menata sistem pemenuhan perbekalan umum Polri yang modern dan berkualitas tinggi.
- 3) Menginventarisir dan menata sistem pembangunan fasilitas Polri yang modern dan ramah lingkungan dalam mendukung operasional kepolisian dan pelayanan publik di tingkat Mabes dan wilayah.

g. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **strategis** Terwujudnya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Polri yang efektif, efisien dan akuntabel, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu :

Modernisasi sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan keuangan yang rasional dan terintegrasi.

- 1) Modernisasi sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi yang rasional dan terintegrasi baik dipusat maupun di wilayah.
- 2) Modernisasi sistem pembiayaan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi antara pusat dan wilayah.

h. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **strategis** Terwujudnya organisasi Polri yang rasional, *agile* dan modern, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu :

Rasionalisasi kelembagaan Polri sesuai dinamika tantangan.

- 1) Melaksanakan transformasi kelembagaan melalui penyederhanaan tata kelola Polri berbasis elektronik, proses bisnis dan analisa beban kerja serta reformasi birokrasi yang berdampak pada peningkatan pelayanan kepolisian di satuan kewilayahan.
- 2) Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam rangka pemerataan dan peningkatan berbagai aspek kualitas pelayanan kepolisian di seluruh satuan kewilayahan.

i. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **strategis** Terwujudnya budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas Kepolisian, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu :

Pemantapan sistem dan regulasi serta pengawasan untuk penerapan budaya integritas.

- 1) Memantapkan sistem dan regulasi standar profesi Polri dengan berbasis

nilai-nilai budaya Polri yang berintegritas, jujur dan malu berbuat cela.

2) Modernisasi sistem manajemen pengawasan berbasis risiko, dan sistem pengaduan masyarakat.

3) Modernisasi pelayanan internal perkantoran yang smart dan hightech.

j. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **strategis** Terwujudnya citra Polri yang positif dan regulasi yang harmonis dalam mewujudkan budaya hukum Masyarakat, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu:

1) Peningkatan pemahaman hukum dan kolaborasi masyarakat.

Modernisasi pengelolaan informasi dan manajemen media dalam meningkatkan pemahaman hukum.

2) Penataan kebutuhan Regulasi serta modernisasi sistem bantuan hukum yang berteknologi modern.

Menata dan menginventarisir produk dan penyusunan peraturan Kepolisian yang menjadi prioritas serta validitas produk peraturan yang berlaku, bantuan hukum yang up-to-date dalam menjawab dinamika tantangan dan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

2. Arah kebijakan dan strategi Itwasda Polda Sumbar Tahun 2025

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Itwasda Polda Sumbar Tahun 2025, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “Menjadikan personel APIP yang berkualitas, professional, dan modern”, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka arah kebijakan yang dilakukan yaitu:

1) Melaksanakan peningkatan kemampuan APIP yang berkualitas, professional, dan modern dengan mengikuti diklat secara bertahap dan berkesinambungan;

(a) Terselenggaranya Bimtek;

- (b) Terselenggaranya pelatihan dan kegiatan *knowledge sharing* dengan satker terkait dan mitra kerja Inspektorat (BPKP dan KPKNL).
- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “Seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar menjadi taat, hemat, efisien, dan efektif dalam pencapaian tugas dan fungsi”, maka arah kebijakan yang dilakukan yaitu:
- Melaksanakan kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.
- 1) Terselenggaranya Audit Kinerja;
 - 2) Terselenggaranya Audit dengan tujuan tertentu.
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “Seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar menjadi taat, hemat, efisien, dan efektif dalam pencapaian tugas dan fungsi”, maka arah kebijakan yang dilakukan yaitu:
- melaksanakan kegiatan Verifikasi terhadap adanya mutasi kepala satuan kerja ketempat yang baru sehingga pelaksanaan kinerja pejabat yang lama dapat dipertanggungjawabkan.
- Terselenggaranya Verifikasi.
- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “Seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar yang direviu dan evaluasi sehingga laporan dapat diyakini”, maka arah kebijakan yang dilakukan yaitu, yaitu:
- melaksanakan reviu atas laporan keuangan, reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), evaluasi AKIP, evaluasi Penilaian Mandiri Penyusunan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan evaluasi Zona Integritas (ZI) diharapkan menghasilkan laporan yang berkualitas;
- Terselenggaranya reviu dan evaluasi.

- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis “Setiap pengaduan masyarakat yang dilaporkan baik langsung maupun tidak langsung dapat ditindak lanjuti serta terwujudnya organisasi Polri yang rasional, agile dan modern”, maka arah kebijakan yang dilakukan yaitu:

Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan, klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan dan penelitian setiap pengaduan;

- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat.

IV. Program, kegiatan dan Pagu Indikatif T.A. 2024

1. Program dan Kegiatan

- a. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri.

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparatur Polri khususnya pada Itwasda Polda Sumbar guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan:

Dukungan manajemen dan tekhnis sarpras.

- b. Program dukungan manajemen.

1) Tujuan:

Terwujudnya good governance dan clean government melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta integrasi lintas sector.

2) Kegiatan:

- a) Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
- b) Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan.

2. Pagu Ideal Itwasda Polda Sumbar T.A. 2025.

Alokasi pagu Indikatif Itwasda Polda Sumbar TA. 2025 sebesar Rp. **6.345.558.000,-** (enam milyar tiga ruatus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp. 109.162.000,- (seratus sembilan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- b. Program dukungan manajemen Rp. 6.236.396.000,- (enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

V. PENUTUP

Demikian Rancangan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja program dan kegiatan T.A. 2025.

Ditetapkan di: Padang
pada tanggal:

Januari

2024

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050542

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH



**RANCANGAN RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Lampiran

KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR: KEP/ /I/REN.2.3./2024 TANGGAL JANUARI 2024